BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
Dan
BUPATI MANGGARAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai.
4. Bupati adalah Bupati Manggarai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Manggarai.
6. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau Tera Batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau Tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan/atau ketentuan yang berlaku.
7. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai secara berkala dengan tanda Tera Sah atau tanda Tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang berhak/penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
8. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut alat-alat UTTP adalah alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, yang merupakan alat-alat yang diperuntukan atau dipakai untuk pengukuran, penakaran, dan penimbangan suatu kuantitas dan/atau kualitas.

9. Wajib Tera /Tera Ulang adalah suatu keharusan bagi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk ditera/tera ulang.
10. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada alat-alat UTTP atau Surat Keterangan Tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya alat-alat UTTP digunakan setelah dilakukan pemeriksaan.
11. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada alat-alat UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap alat-alat UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau tera ulang.
12. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
13. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas penakaran.
14. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
15. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
16. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Teknis yang membidangi Kemetrologian yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan penyelenggaraan Tera, Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Tera/Tera Ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
22. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
24. Kedaluwarsa adalah suatu keadaan untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

## BAB II
## NAMA, OBYEK DAN SUBYEK/WAJIB RETRIBUSI

### Bagian Kesatu
### Nama

#### Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat UTTP, yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua
### Objek

#### Pasal 3

Obyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat UTTP.

Bagian Ketiga
Subjek

Pasal 4

Subyek/Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang alat-alat UTTP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang dihitung berdasarkan:

a. peralatan pengujian yang digunakan;
b. jenis;
c. karakteristik;
d. kapasitas; dan
e. tingkat kesulitan.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Prinsip Penetapan Struktur Retribusi

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas penyelenggaraan, pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
(3) Penerapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa dan hanya untuk menutup sebagian biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Daerah.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
(4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

(1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkanya SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX
## KEBERATAN

### Pasal 13

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### Pasal 14

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.

(3) Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan seluruhnya apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan.

### Pasal 15

(1) Kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan jika pengajuan keberatan dikabulkan seluruhnya atau sebagiannya.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB X
## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 16

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atas kelebihan pembayaran retribusi.

(2) Bupati harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Permohonan pengembalian dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan.

(4) Kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi, apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan.

(7) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI
## PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 17

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII
## PENAGIHAN

### Pasal 18

(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dilakukan dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

(3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

(6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII
## KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 19

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. diterbitkan surat teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## BAB XIV
## PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

### Pasal 20

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV
## PEMERIKSAAN

### Pasal 21

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI
## INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 22

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII
## SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XVIII
## KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 24

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIX
## KETENTUAN PIDANA

### Pasal 25

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XX
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah menyediakan sarana, prasarana dan sumber daya manusia paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 9 Oktober 2018

BUPATI MANGGARAI,
TTD
DENO KAMELUS

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 9 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,
TTD
MANSELTUS MITAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2018 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 11/2018.

**Salinan sesuai dengan aslinya**
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Bour Maximus,SH**
**Pembina Tingkat I**
**NIP. 19630224 199003 1 006**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat penambahan jenis Retribusi. Terdapat 4 (empat) jenis Retribusi baru bagi Kabupaten/Kota, yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bahwa pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang alat-alat UTTP kepada orang pribadi atau Badan, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang intinya menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat UTTP kepada orang pribadi atau Badan.

Dengan adanya penambahan kewenangan pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten tersebut, diharapkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang semakin besar. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis Retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusinya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 07.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG ALAT-ALAT UTTP

| No | Jenis Pelayanan Tera/Tera ulang | Satuan | Pelayanan Tera/ Tera Ulang UTTP | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Di Kantor<br>Tarif ( Rp ) | Di Tempat sidang<br>Tera atau di tempat pakai alat dan atas dasar Permintaan Pemilik Alat<br>Tarif ( Rp ) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1. | Ukuran Panjang | | | |
| | a. Sampai dengan 2 m | | | |
| | 1 Meter dengan pegangan | Buah | 6,000.00 | 15,000.00 |
| | 2 Meter meja dari bahan logam | Buah | 6,000.00 | 15,000.00 |
| | 3 Meter saku baja | Buah | 6,000.00 | 15,000.00 |
| | 4 Salib ukur | Buah | 15,000.00 | 20,000.00 |
| | 5 Gauge block | Buah | 15,000.00 | 30,000.00 |
| | 6 Micrometer | Buah | 20,000.00 | 30,000.00 |
| | 7 Jangka sorong | Buah | 12,000.00 | 40,000.00 |
| | | | | |
| | b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m | | | |
| | 1 Tongkat Duga | Buah | 12,000.00 | 17,000.00 |
| | 2 Meter saku baja | Buah | 10,000.00 | 15,000.00 |
| | 3 Bahan ukur kundang, Depth Tape | Buah | 15,000.00 | 20,000.00 |
| | 4 Alat Ukur tinggi orang | Buah | 15,000.00 | 20,000.00 |
| | 5 Komparator | Buah | 40,000.00 | 50,000.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka | | | |
| | ini ditambah untuk setiap 10 m atau | | | |
| | bagiannya , atas : | | | |
| | 1 Bahan ukur kundang, Depth Tape | Buah | 20,000.00 | 25,000.00 |
| | 2 Komparator | Buah | 40,000.00 | 50,000.00 |
| | | | | |
| 2. | Ukuran Panjang dengan Alat Hitung | | | |
| | ( Counter Gauge ) | Buah | 15,000 | 20,000 |
| 3. | Alat Ukur Permukaan Cairan | | | |
| | ( Level Gauge ) | | | |
| | a. Mekanik | Buah | 50,000.00 | 100,000.00 |
| | b. Elektronik | Buah | 250,000.00 | 300,000.00 |
| 4. | Takaran ( Basah / Kering ) | | | |
| | a. Sampai dengan 2 liter | Buah | 2,000.00 | 3,000.00 |
| | b. Lebih dari 2 l sampai 25 l | Buah | 2,500.00 | 5,000.00 |
| | c. Lebih dari 25 l | Buah | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 5. | Tangki Ukur Tetap | | | |
| | a. Bentuk Selinder Tegak | | | |
| | 1. Sampai dengan 500 Kl | Buah | - | 500,000.00 |
| | 2. Lebih dari 500 Kl dihitung sbb : | | | |
| | 2.1. 500 Kl pertama | Buah | - | 500,000.00 |
| | 2.2. Selebihnya dari 500 Kl sampai dengan 1000 Kl setiap Kl | Buah | - | 1,500.00 |
| | 2.3. Selebihnya dari 1000 Kl sampai dengan 2000 Kl setiap Kl | Buah | - | 700.00 |
| | 2.4. Selebihnya dari 2000 Kl sampai dengan 10000 Kl setiap Kl | Buah | - | 300.00 |
| | 2.5. Selebihnya dari 10000 Kl sampai dengan 20000 Kl setiap Kl | Buah | - | 200.00 |
| | 2.6. Selebihnya dari 20000 Kl setiap Kl | Buah | - | 100.00 |
| | b. Bentuk Silinder Datar: | | | |
| | 1. Sampai dengan 10 kL | Buah | - | 500,000.00 |
| | 2. Lebih dari 500 kL dihitung sbb : | | | |
| | 2.1. 500 Kl pertama | Buah | - | 500,000.00 |
| | 2.2. Selebihnya dari 500 Kl sampai dengan 1000 Kl setiap Kl | Buah | - | 500.00 |
| | 2.3. Selebihnya dari 1000 Kl sampai dengan 2000 Kl setiap Kl | Buah | - | 250.00 |
| | 2.4. Selebihnya dari 2000 Kl sampai dengan 10000 Kl setiap Kl | Buah | - | 150.00 |
| | 2.5. Selebihnya dari 10000 Kl sampai dengan 20000 Kl setiap Kl | Buah | - | 100.00 |
| | 2.6. Selebihnya dan 20000 Kl setiap Kl | Buah | - | 750.00 |
| | Bagian-Bagian dari Kl dihitung 1 Kl | | | |
| | c. Bentuk Bola dan Speroidal | | | |
| | 1. Sampai dengan 500 kL | Buah | - | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 1,000,000.00 |
| | 2. Lebih dari 500 kL dihitung sbb : | | | |
| | 2.1. 500 kL pertama | Buah | - | 1,000,000.00 |
| | 2.2. Selebihnya dari 500 Kl sampai dengan 1000 Kl setiap Kl | Buah | - | 500.00 |
| | Bagian-Bagian dari Kl dihitung Satu Kl | | | |
| 6. | Tangki ukur gerak | | | |
| | a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon | | | |
| | 1. Kapasitas sampai dengan 5 kL | Buah | - | 150,000.00 |
| | 2. Lebih dari 5 kL dihitung sbb : | | | |
| | 2.1. 5 kL pertama | Buah | - | 150,000.00 |
| | 2.2. Selebihnya dari 5 Kl , setiap Kl | Buah | - | 15,000.00 |
| | b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah | | | |
| | dan Tangki Ukur Apung dan Kapal | | | |
| | 1. Sampai dengan 50 kL | Buah | - | 1,000,000.00 |
| | 2. Lebih dari 50 kL dihitung sbb : | | | |
| | 2.1. 50 kL pertama | Buah | - | 1,000,000.00 |
| | 2.2. Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL | Buah | - | 5,000.00 |
| | 2.3. Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL | Buah | - | 2,500.00 |
| | 2.4. Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL | Buah | - | 1,500.00 |
| | 2.5. Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL | Buah | - | 1,000.00 |
| | 2.6. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL | Buah | - | 750.00 |
| | 2.7. Selebihnya dari 1.000 kL, setiap kL | Buah | - | 500.00 |
| | Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL | | | |
| 7. | Alat Ukur dari gelas | | | |
| | a. Labu Ukur, Buret, Pipet | Buah | 35,000.00 | 50,000.00 |
| | b. Gelas Ukur | Buah | 30,000.00 | 50,000.00 |
| 8. | Bejana Ukur | | | |
| | a. Sampai dengan 50 L | Buah | 40,000.00 | 50,000.00 |
| | b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L | Buah | 45,000.00 | 60,000.00 |
| | c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L | Buah | 65,000.00 | 70,000.00 |
| | d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L | Buah | 90,000.00 | 100,000.00 |
| | e. Lebih dari 1.000 L tarif pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L | Buah | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L | | | |
| 9. | Meter Taksi | Buah | 25,000.00 | - |
| | | | | |
| 10. | Thermometer | Buah | 25,000.00 | 35,000.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 11. | Densimeter | Buah | 25,000.00 | 35,000.00 |
| | | | | |
| 12. | Viskometer | Buah | 25,000.00 | 35,000.00 |
| 13. | Alat Ukur Luas | Buah | 25,000.00 | 35,000.00 |
| 14. | Alat Ukur Sudut | Buah | 25,000.00 | 35,000.00 |
| 15. | Alat Ukur Cairan Minyak | | | |
| | a. Meter Bahan Bakar Minyak : | | | |
| | a.1. Meter Induk : | | | |
| | 1. Sampai dengan 25 m3/jam | Buah | 150,000.00 | 200,000.00 |
| | 2. Lebih dari 25 m3/jam dihitung sbb: | | | |
| | 2.1. 25 m3/jam pertama | Buah | 150,000.00 | 200,000.00 |
| | 2.2. Selebihnya dari 25 m3/jam sampai dengan 100 m3/jam, setiap m3/jam | Buah | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 2.3. Selebihnya dari 100 m3/jam sampai dengan 500 m3/jam, setiap m3/jam | Buah | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | 2.4. Selebihnya dari 500 m3/jam, setiap m3/jam | Buah | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | Bagian-bagian dari m3/jam dihitung satu m3/jam | | | |
| | a.2. Meter Kerja : | | | |
| | 1. Sampai dengan 15 m3/jam, lebih dari 15 m3/jam dihitung sbb : | | | |
| | 2.1. 15 m3/jam pertama | Buah | 70,000.00 | 85,000.00 |
| | 2.2. Selebihnya dari 15 m3/jam sampai dengan 100 m3/jam | Buah | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | 2.3. Selebihnya dari 100 m3/jam sampai dengan 500 m3/jam | Buah | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | 2.4. Selebihnya dari 500 m3/jam | Buah | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | Bagian-bagian dari m3/jam dihitung satu m3/jam | | | |
| | a.3. Pompa Ukur | | | |
| | Untuk setiap Badan Ukur | Buah | - | 50,000.00 |
| 16. | Alat Ukur Gas | | | |
| | a. Meter Induk | | | |
| | 1. Sampai dengan 100 m3/jam | Buah | 150,000.00 | 200,000.00 |
| | 2. Lebih dari 100 m3/jam dihitung sbb: | | | |
| | 2.1. 100 m3/jam pertama | Buah | 150,000.00 | 200,000.00 |
| | 2.2. Selebihnya dari 100 m3/jam sampai dengan 500 m3/jam, setiap m3/jam | Buah | 500.00 | 500.00 |
| | 2.3. Selebihnya dari 500 m3/jam sampai dengan 1.000 m3/jam, setiap m3/jam | Buah | 200.00 | 200.00 |
| | 2.4. Selebihnya dari 1.000 m3/jam sampai dengan 2.000 m3/jam, setiap m3/jam | Buah | 100.00 | 100.00 |
| | 2.5. Selebihnya dari 2.000 m3/jam, setiap m3/jam | Buah | 50.00 | 50.00 |
| | Bagian-bagian dari m3/jam dihitung satu m3/jam | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | b. Meter Kerja | | | |
| | 1. Sampai dengan 50 m3/jam | Buah | 60,000.00 | 100,000.00 |
| | 2. Lebih dari 50 m3/jam dihitung sbb: | | | |
| | 2.1. 50 m3/jam pertama | Buah | 60,000.00 | 100,000.00 |
| | 2.2. Selebihnya dari 50 m3/jam sampai dengan 500 m3/jam, setiap m3/jam | Buah | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | 2.3. Selebihnya dari 500 m3/jam sampai dengan 1.000 m3/jam, setiap m3/jam | Buah | 500.00 | 500.00 |
| | 2.4. Selebihnya dari 1.000 m3/jam sampai dengan 2.000 m3/jam, setiap m3/jam | Buah | 100.00 | 100.00 |
| | 2.5. Selebihnya dari 2.000 m3/jam, setiap m3/jam Bagian-bagian dari m3/jam dihitung satu m3/jam | Buah | 50.00 | 50.00 |
| | c. Meter Gas *Orifice* dan Sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur) | Buah | 500,000.00 | 550,000.00 |
| | d. Perlengkapan Meter Gas Orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan | Buah | 100,000.00 | 125,000.00 |
| | e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur | Buah | 100,000.00 | 125,000.00 |
| 17. | Meter Air | | | |
| | a. Meter induk | | | |
| | 1. Sampai dengan 15 m3/jam | Buah | 50,000.00 | 75,000.00 |
| | 2. Lebih dari 15 m3/jam sampai dengan 100 m3/jam | Buah | 100,000.00 | 125,000.00 |
| | 3. Lebih dari 100 m3/jam | Buah | 150,000.00 | 175,000.00 |
| | b. Meter Kerja | | | |
| | 1. Sampai dengan 15 m3/jam | Buah | 4,500.00 | 5,000.00 |
| | 2. Lebih dari 15 m3/jam sampai dengan 100 m3/jam | Buah | 8,500.00 | 9,000.00 |
| | 3. Lebih dari 100 m3/jam | Buah | 12,000.00 | 15,000.00 |
| 18. | Meter Cairan Minum Selain Air | | | |
| | a. Meter induk | | | |
| | 1. Sampai dengan 15 m3/jam | Buah | 100,000.00 | 125,000.00 |
| | 2. Lebih dari 15 m3/jam sampai dengan 100 m3/jam | Buah | 145,000.00 | 180,000.00 |
| | 3. Lebih dari 100 m3/jam | Buah | 175,000.00 | 200,000.00 |
| | b. Meter Kerja | | | |
| | 1. Sampai dengan 15 m3/jam | Buah | 25,000.00 | 50,000.00 |
| | 2. Lebih dari 15 m3/jam sampai dengan 100 m3/jam | Buah | 50,000.00 | 75,000.00 |
| | 3. Lebih dari 100 m3/jam | Buah | 75,000.00 | 100,000.00 |
| 19. | ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC) / TEKANAN/ KOMPENSASI LAINNYA | Buah | 100,000.00 | 125,000.00 |
| 20. | Meter Prover | | | |
| | a. Sampai dengan 2000 l | Buah | 500,000.00 | 500,000.00 |
| | b. Lebih dari 2000 l sampai dengan 10000 l | Buah | 750,000.00 | 750,000.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | c. Lebih dari 10000 l | Buah | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 21. | Meter Arus Massa | | | |
| | Untuk setiap jenis media uji : | | | |
| | a. Sampai dengan 15 kg/min | Buah | 100,000.00 | 125,000.00 |
| | b. Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb : | | | |
| | 1. 15 kg/min pertama | Buah | 100,000.00 | 125,000.00 |
| | 2. Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min | Buah | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | 3. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min | Buah | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | 4. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min | Buah | 800.00 | 800.00 |
| | 5. Selebihnya dari 1.000 kg/min, dihitung satu kg/min | Buah | 500.00 | 500.00 |
| 22. | ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) | | | |
| | Untuk setiap mesin pengisi | | | |
| | a. Sampai dengan 4 alat pengisi | Buah | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi | Buah | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 23. | METER LISTRIK ( Meter kWh ) | | | |
| | a. Meter Induk | | | |
| | 1. 3 (tiga) phasa | Buah | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | 2. 1 (satu) phasa | Buah | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | b. Meter Kerja kelas 2 | | | |
| | 1. 3 (tiga) phasa | Buah | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | 2. 1 (satu) phasa | Buah | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | c. Meter Kerja kelas | | | |
| | 1. 3 (tiga) phasa | Buah | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | 2. 1 (satu) phasa | Buah | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 24. | A. ANAK TIMBANGAN | | | |
| | a. Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas M2 dan M3): | | | |
| | 1. Sampai dengan 1 kg | Buah | 500.00 | 500.00 |
| | 2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg | Buah | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg | Buah | 2,500.00 | 2,500.00 |
| | b. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1): | | | |
| | 1. Sampai dengan 1 kg | Buah | 2,500.00 | 2,500.00 |
| | 2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg | Buah | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg | Buah | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1): | | | |
| | 1. Sampai dengan 1 kg | Buah | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | 2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg | Buah | 25,000.00 | 25,000.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg | Buah | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | | | | |
| | B. TIMBANGAN | | | |
| | a. Neraca Emas dan Obat | Buah | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | b. Neraca Biasa | Buah | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | c. Dacin | Buah | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | d. Sentisimal | Buah | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | e. Desisimal dan Milisimal | Buah | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | f. Bobot Ingsut : | | | |
| | 1. Sampai dengan 150 kg | Buah | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | 2. Lebih Besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg | Buah | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 3. Lebih dari 500 kg | Buah | 70,000.00 | 70,000.00 |
| | g. Meja | Buah | 7,500.00 | 7,500.00 |
| | h. Pegas | Buah | 7,500.00 | 7,500.00 |
| | i. Cepat : | | | |
| | 1. Sampai dengan 150 kg | Buah | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | 2. Lebih Besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg | Buah | 40,000.00 | 40,000.00 |
| | 3. Lebih dari 500 kg | Buah | 80,000.00 | 80,000.00 |
| | j. Timbangan pengecek dan penyortir | Buah | 250,000.00 | 250,000.00 |
| | k. Timbangan semi otomatis | Buah | 250,000.00 | 250,000.00 |
| | l. Timbangan Jembatan, setiap ton | Buah | 35,000.00 | 35,000.00 |
| | m. Timbangan elektronik | | | |
| | 1. Sampai dengan 3.000kg | | | |
| | a). Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas III dan IIII) : | | | |
| | 1) Sampai dengan 25 kg | Buah | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | 2) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg | Buah | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | 3) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg | Buah | 25,000.00 | 25,000.00 |
| | 4) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg | Buah | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | 5) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg | Buah | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | b). Ketelitian Halus (Kelas II) : | | | |
| | 1) Sampai dengan 1 kg | Buah | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg | Buah | 75,000.00 | 75,000.00 |
| | 3) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg | Buah | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | 4) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 | Buah | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | kg | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| | 5) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg | Buah | 300,000.00 | 300,000.00 |
| | c). Ketelitian Khusus (Kelas I) | Buah | 400,000.00 | 400,000.00 |
| | 2. Lebih dari 3.000 kg : | | | |
| | a). Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton | Buah | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | b). Ketelitin khusus dan halus, setiap ton | Buah | 25,000.00 | 25,000.00 |
| | 3. Timbangan Ban Berjalan : | | | |
| | a). Sampai dengan 100 ton/jam | Buah | 500,000.00 | 500,000.00 |
| | b). Lebih dari 100 ton/jam sampai dengan 500 ton/jam | Buah | 750,000.00 | 750,000.00 |
| | c). Lebih dari 500 ton/jam | Buah | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| | Timbangan dengan dua skala (multirange) atau lebih dan dengan sebuah | | | |
| | alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan | | | |
| | setiap skala timbang, tarif, pengujian, peneraan atau penera ulangannya | | | |
| | dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas | | | |
| | masing-masing serta menurut tarif pada angka 1, 2 dan 3 | | | |
| 25. | a. *Dead Weight Testing Machine*: | | | |
| | 1. Sampai dengan 100 kg/cm2 | Buah | 5,000.00 | 15,000.00 |
| | 2. Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2 | Buah | 25,000.00 | 25,000.00 |
| | 3. Lebih dari 1.000 kg/cm2 | Buah | 35,000.00 | 35,000.00 |
| | b. Alat ukur tekanan darah | Buah | 25,000.00 | 25,000.00 |
| | c. Manometer Minyak : | | | |
| | 1. Sampai dengan 100 kg/cm2 | Buah | 25,000.00 | 25,000.00 |
| | 2. Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2 | Buah | 35,000.00 | 35,000.00 |
| | 3. Lebih dari 1.000 kg/cm2 | Buah | 40,000.00 | 40,000.00 |
| | d. *Pressure Calibrator* | | | |
| | e. *Pressure Recorder* : | | | |
| | 1. Sampai dengan 100 kg/cm2 | Buah | 25,000.00 | 25,000.00 |
| | 2. Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2 | Buah | 35,000.00 | 35,000.00 |
| | 3. Lebih dari 1.000 kg/cm2 | Buah | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 26. | PENCAP KARTU | | | |
| | (*Printer/Recorder*) OTOMATIS | Buah | 5,000.00 | 25,000.00 |
| 27. | METER KADAR AIR | | | |
| | a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi | Buah | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, | Buah | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | kapas dan tekstil setiap komoditi | | 25,000.00 | 25,000.00 |
| | c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi | Buah | 30,000.00 | 30,000.00 |

BUPATI MANGGARAI,
TTD
DENO KAMELUS

**Salinan sesuai dengan aslinya**
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Bour Maximus,SH**
**Pembina Tingkat I**
**NIP. 19630224 199003 1 006**